KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Cerita Bamsoet Selepas Buka Puasa Bersama di Istana: Ibu Kota Baru Tak Bebani APBN
Tanggal : Rabu, 08 Mei 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Cerita Bamsoet Selepas Buka Puasa Bersama Di Istana

Ibu Kota Baru Tak Bebani APBN

Ketua DPR Bambang Soesatyo mendukung penuh rencana Pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta keluar Jawa. Jika pemindahan itu sukses, dia yakin Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain yang ingin melakukan hal serupa.

"PEMINDAHAN ibu kota negara bukan hal mustahil untuk dilakukan. Dengan catatan dilakukan melalui persiapan dan kajian yang matang. Terutama agar tidak membebani struktur APBN yang saat ini difokuskan untuk pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat," ujar politisi yang akrab disapa Bamsoet ini, di Jakarta, kemarin.

Senin kemarin, Bamsoet bersama para pimpinan lembaga negara berbuka puasa bersama Presiden Jokowi di Istana Negara. Sembil menunggu azan Magrib, dilakukan diskusi kecil antara Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta, dan dirinya.

Dalam diskusi itu, Presiden menjelaskan, dibutuhkan paling sedikit luas lahan 40.000 hektare untuk ibu kota baru. Lahan ini sekarang sudah ada.Mengenai biaya, kata Bamsoet, Presiden memastikan, tidak akan membebani APBN.

"Intinya, kita membangun kota baru dan pusat pemerintahan di lokasi yang tidak jauh dari kota yang sudah fungsional atau aktif sebelumnya. Semua nanti, kata Presiden, akan dikerjakan BUMN dan swasta sehingga tidak membebani APBN," tutur Bamsoet.

Kajian tentang pemindahan ibu kota dibahas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Hasil kajian itu akan dibahas secara mendalam dalam Rapat Kerja Bappenas dengan berbagai Komisi di DPR.

"Rabu ini DPR akan kembali membuka masa persidangan. Rencana pemindahan ibu kota negara harus dibahas secara komprehensif dalam rapat kerja Pemerintah dengan Komisi terkait di DPR, agar tidak ada yang terlewatkan. Sehingga kita bisa saling mengoreksi dan memberikan masukan," ujarnya.

"Selain itu, juga berkaitan dengan Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota, yang saat ini dimiliki Jakarta. Jika jadi dipindah, Undang-Undang tersebut tentu akan mengalami penyesuaian terhadap daerah baru yang dijadikan ibu kota negara," sambung Bamsoet.

Bagi Bamsoet, keseriusan Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara patut diberikan apresiasi. Ini membuktikan, Presiden Jokowi tidak ingin pertumbuhan pembangunan dipusatkan di Pulau Jawa saja.

"Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta sudah sering diwacanakan di berbagai era pemerintahan sebelumnya. Memasuki periode kedua kepemimpinannya, Presiden Jokowi kembali menunjukkan komitmen pembangunan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Salah satunya melalui pemindahan ibu kota negara," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini berharap, Indonesia tidak hanya meniru berbagai negara dalam memindahkan ibu kotanya. "Begitupun dengan Indonesia, jika nanti jadi memindahkan ibu kota negara, harus ada nilai-nilai penting yang kita berikan kepada dunia sebagai teladan," papar Bamsoet.

Nilai-nilai tersebut, lanjut Bamsoet, misalnya, pemindahan ibu kota negara bukan hanya menghidupkan wilayah di sekitar ibu kota baru saja, melainkan yang paling penting tidak sampai menimbulkan konflik antara warga yang sudah lama bermukim dengan pendatang baru. Masalah gesekan sosial seperti inilah yang sangat patut diwaspadai.

"Sosialisasi dengan pendekatan kebudayaan sangat penting untuk dilakukan. Pemindahan ibu kota negara tidak hanya mengembangkan wilayah baru, namun juga harus kian menyolidkan rasa persaudaraan sesama anak bangsa," pungkas Bamsoet. ■ ONI